

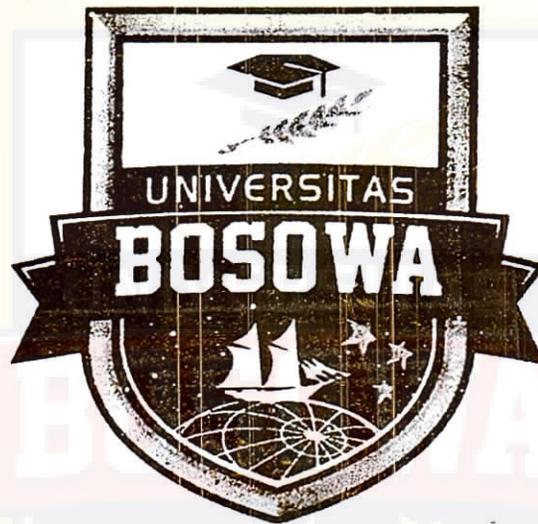
EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BURU SELATAN

Diajukan oleh

ROSMINA SATURU

45 13 013 074



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2017

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BURU SELATAN

Diajukan oleh

ROSMINA SATURU

45 13 013 074



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan
Nama Mahasiswa : Rosmina Saturu
Stambuk/Nim : 4513013074
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fiman Menne, SE., M.Si. Ak., CA

Dr. Hj. Herminawati A. SE., MM

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH.



Thanwain SE., M.Si.

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rosmina Saturu

Nomor Stambuk : 4513013074

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan, merupakan karya asli, seluruh ide yang ada dalam skripsi ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri. Selain itu tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik.

Jika pernyataan diatas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 04 September 2017

Mahasiswa yang bersangkutan



Rosmina Saturu

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

**Oleh
ROSMINA SATURU**

**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bososwa Makassar**

ABSTRAK

Rosmina Saturu, 2017. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan (Dr. Firman Manne, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Herminawati A., SE., MM Selaku Pembimbing II).

Sesuai dengan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat pengelola keuangan daerah mempunyai tugas untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan diukur dari Tingkat Kemandirian Daerah, Tingkat Efektivitas Daerah, Tingkat Efisiensi, dan Tingkat Pertumbuhan. Data yang digunakan berbentuk penelitian laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yaitu data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2011-2015, dimana didalamnya terdapat data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Belanja, Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Anggaran, (SILPA), Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif

Hasil penelitian Kinerja Keuangan Daerah menunjukkan Bahwa rata-rata Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berada pada tingkat sangat baik, rata-rata Rasio Tingkat Efektivitas dan Efisiensi berada pada Tingkat Sangat Tinggi dan Rasio Pertumbuhan cukup.

Kata Kunci : Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemampuan Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**EVALUATION PERFORMANCE FINANCE AREA
DISTRICT BURU SOUTH**

By :
ROSMINA SATURU

**Program Study Accounting Faculty Of Economics
Bosowa University Makassar**

ABSTRACT

Rosmina Saturu, 2017. Evaluation Performance Finance Area District Buru South (Guided by Mr. Firman Menne, as a Mentor I and Mr. Hj. Herminawati a., SE., MM, as Mentor II).

In accordance With Law No.17 of 2003 on State Finance, within the Framework of regional financial management, Regional Financial Management Officer has a duty to prepare financial statements which is the implementation of the budget accountability. This study aims to determine the Regional Financial Performance is measured Financial Capability. Governments of independence Regional level, Regional Dependency, Level Fiscal Decentralization and Efficiency levels. The data used in the form of research reports that local Government Financial Statistics Data Regional Budget period 2011-2015, in which there are data Local Revenue, Total Expenditure, Balance Funds, and Budget Surplus. The method of analysis used is time series data. The results of Regional Financial research show that average ratio level independence finance area located on level very good, average ratio effectiveness and efficiency located on level very high and ratio growth enough

Keywords : Evaluation Regional Financial Performance, Financial Capability Map, Revenue and Expenditure (Budget)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar.

Skripsi ini di buat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakannya skripsi ini, dan tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Ir.Muh. Salle Pallu.,MM Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak A. Arifuddin Mane, SE. SH. M.si.MHI Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar
3. Bapak Thanwain SE.M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar
4. Bapak Dr. Firman Manne,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku pembimbing I. Terima kasih atas semua hal yang telah pak berikan. Terima kasih atas dukungan Bapak ketika penulis mengalami kesulitan. Terima kasih sudah mendengar keluhan keluhan yang penulis rasakan.

Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penulis pernah melakukan kesalahan dan banyak merepotkan bapak. Saya tidak bisa memberi apa-apa kecuali doa. Sekali lagi terima kasih bapak atas limpahan ilmu yang bapak berikan kepada saya.

5. Ibu Dr. Hj. Herminawati A.,SE.,MM selaku pembimbing II. Terima kasih atas semua dukungan semangat yang telah diberikan. Terima kasih atas semua waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas ilmu yang ibu beri selama penyusunan skripsi ini . Lewat tulisan ini penulis memohon maaf apa bila dalam penulisan skripsi in ada hal yang tidak berkenan di hati ibu. Semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Kepada semua dosen yang telah mengajarkan kami ilmu selama ini, memberikan inspirasi terkhusus kepada Bapak Dr. Muhlis Ruslan, SE. M.Si. Ibu Farida SE.M.Si.,Ak.,CA. Dan masi banyak lagi yang mungkin tidak di tulis pada kesempatan ini.
7. Kedua Orang tercinta dan terkasih, Ayahanada Samsudin Saturu dan Ibunda Saida Solissa yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan tiada henti hentinya mendo'akan sepanjang perjalanan hidup.
8. Bapak pimpinan dan seluru kariawan kantor keuangan daerah kabupaten buru selatan. Yang telah membantu, memberikan imformasi dan fasilitas dalam pengumpulan data yang bermamfaat dalam penulisan ini.
9. Spesial buat seseorang tersayang yang selalu menyemangat dan senantiasa mendo'akan, mendukung, memberikan saran kritik yang membangun slama ini.

10. Kepada teman-teman Fakultas Ekonomi khususnya Akuntansi angkatan 2013. Terima kasih atas pertemanannya, semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses.

Penulis menyadari bahwa dengan kemampuan yang terbatas serta kurangnya pengetahuan dan pengalaman maka, tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran, yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan tulisan ini,

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun teman-teman mahasiswa lainnya

Wassalamu Alakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Mei 2017



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Pemelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Laporan Keuangan Daerah	6
2..1.2 Kinerja	7
2.1.2.1 Pengertian Kinerja	7
2.1.2.2 Pengertian Pengukuran Kinerja	8
2.1.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja	10
2.1.2.4 Aspek Pengukuran Kinerja.....	11

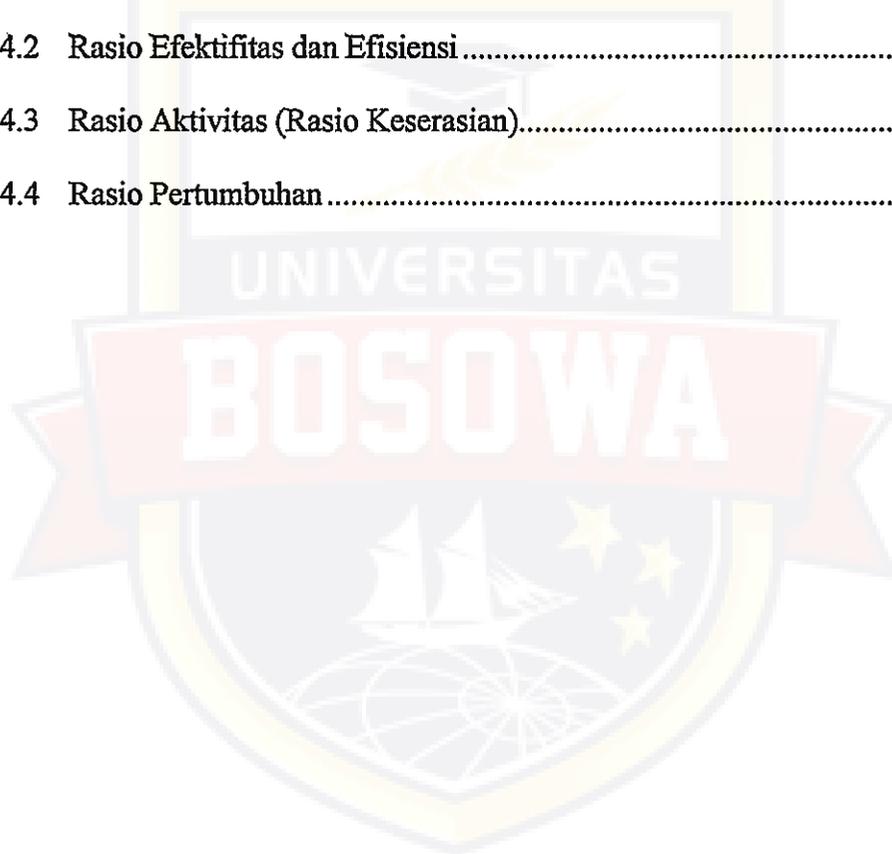
2.1.3 Rasio Keuangan	13
2.1.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	14
2.1.3.2 Rasio Efektifitas Dan Efesiensi Pendapatan Asli Daerah	16
2.1.3.3 Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian)	18
2.1.3.4 Rasio Pertumbuhan	19
2.2 Kerangka Pikir	20
2.3 Hipotesis	23
BAB III Metodologi Penelitian	24
3.1 Daerah dan Waktu Penelitian.....	24
3.2 Metode Pengumpulan Data	24
3.3 Jenis dan Sumber data	25
3.4 Metode Analisis	26
3.5 Defenisi Oprasional	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Buru Selatan.....	30
4.1.1 Sejarah Lahirnya Kab Buru Selatan	30
4.1.2 Keadaan Geografis dan Ekonomi Kab. Buru Selatan.....	33
4.2 Visi dan Misi Kabupaten Buru Selatan	34
4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kab. Buru Selatan.....	34
4.4 Perhitungan Rasio Keuangan Daerah pada Kab buru Selatan	37

BAB V PENUTUP	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	16
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah	17
Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	18
Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan..	35
Tabel 4.2 Rasio Efektifitas dan Efisiensi	35
Tabel 4.3 Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian).....	36
Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan	36



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka.....	22
Tabel 4.1 Struktur Organisasi	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten atau kota karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan

keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk

memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Pengelolaan kinerja keuangan kabupaten Buru Selatan meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penilaian WDP pada pengelolaan kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa aparatur pemerintah masih lemah dalam mengelola keuangannya. Terlalu banyak kejanggalan arus anggaran baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran menjadi salah satu indikator yang dinilai menjadi penyebab buruknya sistem keuangan tersebut. Ada enam indikator yang paling lemah yakni; sistem administrasi yang serampangan, banyak kebocoran anggaran dalam pendapatan, lemahnya sistem pertanggungjawaban anggaran, peran Inspektorat lemah, SDM Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) kurang dan lemah, dan tidak adanya *good will* dari setiap stakeholder dalam mengelola anggaran tersebut sesuai dengan skenario anggaran yang semestinya.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengangkat judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

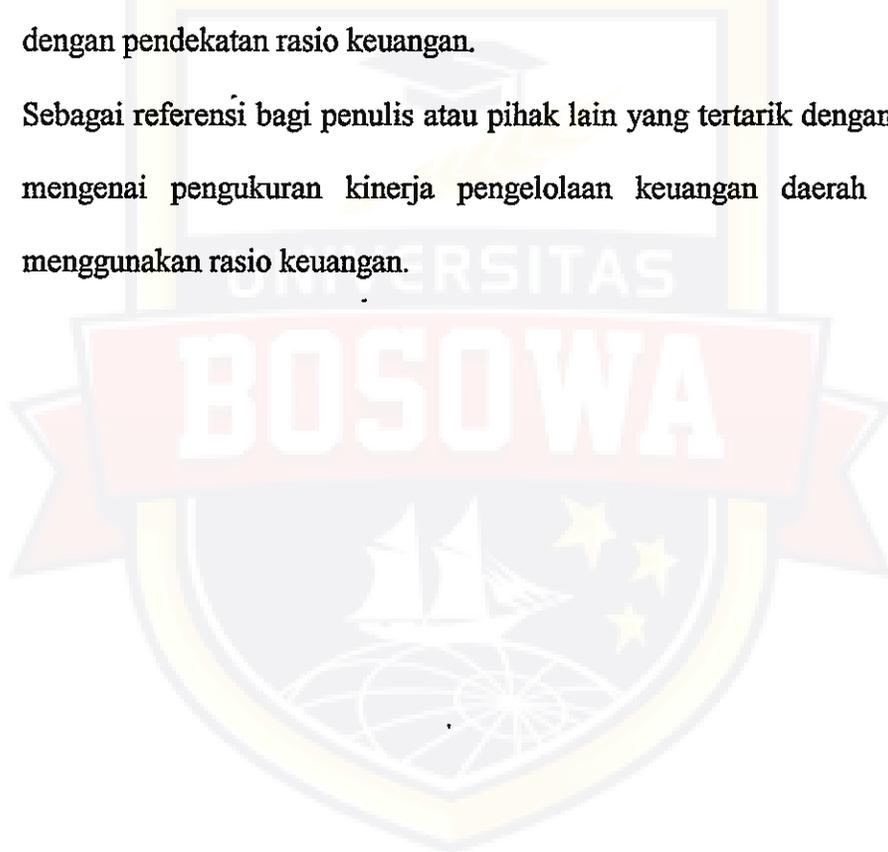
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011 hingga tahun 2015”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan mengetahui kinerja dalam mengelola keuangan daerahnya yang dinilai dengan menggunakan rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran pada tahun anggaran 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan aplikasinya.
2. Sebagai masukan bagi instansi pemerintahan daerah dalam hal pengukuran kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah khususnya dengan pendekatan rasio keuangan.
3. Sebagai referensi bagi penulis atau pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, disusunlah laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan Pasal 232 dari Permendagri No 13 Tahun 2006, Laporan keuangan pemda terdiri atas (Halim 2007:73):

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Namun demikian, dari sudut pandang akuntansi, dapat pula disusun laporan tambahan, yaitu laporan kinerja keuangan perubahan ekuitas dana (untuk entitas pemda secara keseluruhan) atau laporan perubahan rekening Koran pemda (untuk satuan kerja).

Sebagaimana halnya laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha perusahaan dalam rentan waktu tertentu, Laporan Perhitungan APBD juga menunjukkan kinerja pemda sebagai penyusun dan pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Laporan Perhitungan APBD menyajikan pendapatan pemda selama satu periode dan belanja untuk memperoleh pendapatan tersebut pada periode yang sama.

Nota Perhitungan APBD berisi ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun

yang sedang berlangsung. Kinerja keuangan antara lain mencakup kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, program, dan kegiatan selama periode akuntansi, kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan serta investasi.

Laporan perubahan ekuitas dana pemda menyajikan informasi mengenai perubahan surplus/defisit anggaran akibat berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu periode. Laporan perubahan ekuitas dana merupakan pelengkap dari Laporan Perhitungan APBD.

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan.

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan daerah pada saat tertentu, biasanya pada akhir tahun anggaran. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, utang.

2.1.2 Kinerja

2.1.2.1 Pengertian Kinerja

Menurut Mahsun, Sulistyowati dan Purwanu (2007:157) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Menurut Bastian (2006:274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009 : 67) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Veizal Rivai (2009:549) mengemukakan kinerja merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan.

2.1.2.2 Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Robertson (dalam Mahsun, dkk 2007:157), pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termaksud

informasi atas: efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Mahsun, (2007:157), pengukuran kinerja adalah suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi.

Pendapat lain menurut James B. Whittaker (dalam Bastian 2006:330) pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Menurut Larry D Stout dalam *Performance Measurement Guide* (Bastian 2006:329) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Menurut Mardiasmo (2002:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial”.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan

menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang akan datang. Berapa besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

2.1.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja

Prestasi pelaksanaan program dapat diukur untuk mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk (Bastian 2006:330):

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaanyang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

2.1.2.4. Aspek Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini (Bastian 2006:331):

1. Aspek Finansial.

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga Dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

2. Kepuasan Pelanggan.

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

3. Operasi dan Pasar Internal.

Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.

4. Kepuasan Pegawai.

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.

5. Kepuasan Komunitas dan *Stakholders*.

Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para *stakeholders*.

6. Waktu

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

Mekanisme pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja.

Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin membuat komitmen pengukuran kinerja, dan menjalankannya dengan tidak mengharapkan pengukuran kinerja akan langsung sempurna, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja tersebut.

b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja.

c. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi

Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan bentuk dan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi.

2.1.3. Rasio Keuangan

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersil), analisis rasio keuangan umumnya terdiri dari dari :

1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera.
2. Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur.
3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
4. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, yaitu:

1. Para kreditur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
2. Pemegang saham ataupun pemilik perusahaan, yaitu untuk menganalisis sampai sejauh mana perusahaan mampu membayar deviden ataupun memperoleh laba.
3. Pengelola, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai landasan dalam mengambil keputusan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, serta *debt service coverage ratio*. (Halim 2007: 231)

2.1.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan

pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim 2007: 232).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2007) :

- Pendapatan Asli Daerah terhadap Total pendapatan
- Pendapatan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio Pendapatan Transfer:

- Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan
- Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan

- Rasio Dana Alokasi Umum terhadap total Pendapatan
- Rasio Dana Alokasi Umum terhadap belanja Pegawai
- Rasio Lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan
- Rasio Belanja Transfer/Bag! hasil Pendapatan ke Kabupaten/ Kota terhadap Total Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Rasio Kemandirian Daerah $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{(Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)}}$

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

2.1.3.2 Rasio Efektifitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim 2007:234).

Realisasi Penerimaan PAD

Rasio Efektifitas = $\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah.

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

b. Rasio Efisiensi

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil

merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim 2007:234).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

2.1.3.3 Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin

kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007:236):

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relative masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan didaerah.

Nama akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal. Dan nama akun belanja operasi dan belanja modal tercantum pada PP Nomor 24 tahun 2005.

2.1.3.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya

pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim 2007:241).

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan } \Sigma \text{ Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan } \Sigma \text{ Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan } \Sigma \text{ Pendapatan } x_{n-1}}$$

Keterangan:

x_n = tahun yang dihitung.

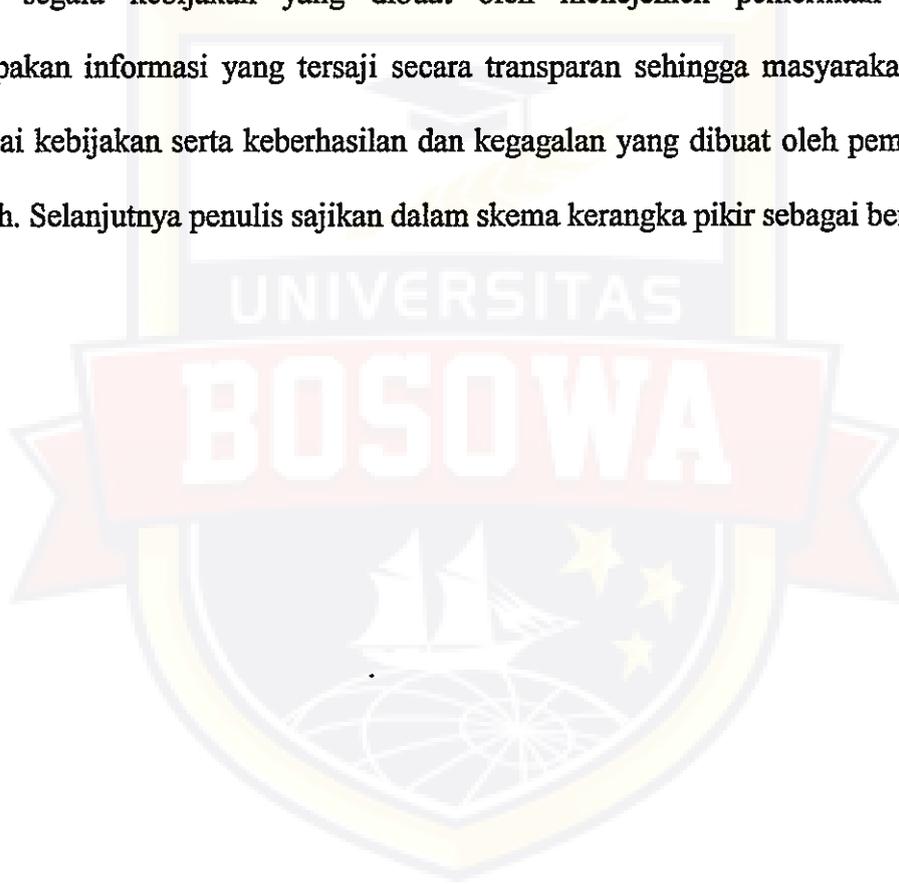
x_{n-1} = tahun sebelumnya.

2.2 Kerangka Pikir

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan dalam bentuk Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Di samping itu, dengan adanya laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan) diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Artinya, bahwa melalui laporan keuangan, maka segala kebijakan yang dibuat oleh manajemen pemerintah daerah merupakan informasi yang tersaji secara transparan sehingga masyarakat dapat menilai kebijakan serta keberhasilan dan kegagalan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selanjutnya penulis sajikan dalam skema kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1



2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan masalah pokok di atas, maka penulis menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Diduga bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan periode 2011 sampai 2015 belum optimal



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Daerah dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan. Adapun waktu penelitian yang direncanakan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan. April dan mei

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berdasarkan metode :

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru Selatan dalam hal ini di Kantor Keuangan Daerah dengan menggunakan wawancara dengan pihak terkait.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur. Wawancara peneliti lakukan untuk melengkapi data yang tidak sempat tercover pada tinjauan kepustakaan dan website sekaligus untuk melengkapi data yang dirasakan perlu sebagai bahan banding dari hasil data pengamatan yang peneliti lakukan. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono 2010 : 140).

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat memberikan informasi terkait data penelitian, dokumen

yang dimaksud adalah segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti buku, artikel, media massa, Undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya (Sarosa, 2012: 61).

2. Tinjauan kepustakaan (*library research*).

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. hal ini dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang permasalahan yang akan dibahas.

3. Mengakses website atau situs-situs

menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3.3. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Keuangan Daerah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
- b. Kuantitatif yaitu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2011-2015 serta data data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian,

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan untuk

memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*) pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan yang berhubungan dengan penelitian berupa penelitian lapangan, tinjauan kepustakaan, mengakses website atau situs-situs dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain maupun sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

3.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (*Descriptive Kuantitative*), yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung *Rasio Keuangan* dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun Anggaran 2011-2015 yang dilakukan dengan cara:

Menghitung Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, dengan menggunakan rasio-rasio berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/ Provinsi dan pinjaman}}$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Rasio Efektifitas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

b. Rasio Efisiensi

Untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Penerimaan PAD}}$$

3. Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian)

Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Pertumbuhan } \sum \text{Pendapatan } x_{n-1}}$$

Keterangan:

x_n = tahun yang dihitung

x_{n-1} = tahun sebelumnya

3.5 Defenisi Operasional

1. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
4. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Buru Selatan

4.1.1 Sejarah Lahirnya Kabupaten Buru Selatan

Perjalanan sejarah lahirnya Kabupaten Buru Selatan secara filosofis dengan berbagai dinamika di tengah peradaban masyarakat Indonesia, Maluku, Buru dan khususnya Buru Selatan selalu dikenang dan terpatri dalam sanubari anak-anak Fuka Bubolo.

Tahapan demi tahapan perjuangan pembentukan Kabupaten Buru Selatan dimulai sejak Tahun 2003. Salah satu instrument advokasi yang dilakukan melalui penyampaian aspirasi dan sikap representative masyarakat Buru Selatan ke DPRD Provinsi Maluku, dan Gubernur Maluku (kala itu Kantor Gubernur masih menempati Kantor Telkom di kawasan Talake – Ambon).

Jeritan hati anak Fuka Bupolo berlanjut di Tahun 2004 melalui beberapa penggagas yang kemudian membentuk Lembaga Pengembangan Buru Selatan (LPBS). LPBS ditetapkan oleh masyarakat buru selatan yang berada di ibu kota Provinsi Maluku dan sekitarnya pada 4 Agustus 2004 dengan kepengurusan terdiri dari steering Committee dan Organization Committee.

Pada bulan September 2004 hingga April 2005, seluruh stakeholder Pemerintah Desa (Kepala Desa/Dusun, Toko Agama, Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan empat Raja Reheecschaft pada lima kecamatan di Kabupaten Buru Selatan) menyampaikan rekomendasi resmi kepada LPBS untuk disikapi, ditindaklanjuti, untuk diperjuangkan ke Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah

Provinsi Maluku dan selanjutnya ke Pemerintah Pusat yang intinya Buru Selatan harus menjadi daerah otonom baru di Provinsi Maluku.

selanjutnya, pada bulan Mei 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006, dokumen rekomendasi hasil survey LPBS diteruskan Tim Assistensi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Pemerintah Provinsi Maluku untuk selanjutnya melakukan penelitian maupun kajian berdasarkan data dan dokumen pendukung lainnya guna menyimpulkan hasil visibility Study Wilayah Buru Selatan menjadi Dokumen ilmiah/akademisi dan dipaneliskan/presentasikan ke Pemerintah Kabupaten Buru.

setelah itu, rekomendasi persetujuan Bupati Buru dan persetujuan Keputusan DPRD Kabupaten Buru, maka terbitlah persetujuan rekomendasi Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan empat keputusan DPRD Kabupaten Buru pada juni 2006, antara lain : satu, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2006 Persetujuan Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom baru, kedua, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2006 tentang batas wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru. Ketiga, Keputusan DPRD Kabupaten Buru nomor 06 Tahun 2006 tentang Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru Keempat, Keputusan DPRD Kabupaten Buru Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan dana Kabupaten Buru kepada Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru selama tiga tahun berturut-turut.

Perjuangan LPBS masih berlanjut sampai juli tahun 2006, melalui persetujuan keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan Persetujuan Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 130 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru.

Setelah seluruh dokumen di tingkat provinsi rampung, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku tentang persyaratan pembentukan, penggabungan dan penghapusan kabupaten/kota, maka semua dokumen visibility study pembentukan Kabupaten Buru Selatan oleh pemerintah Kabupaten Buru maupun Pemerintah Provinsi Maluku bersama LPBS mengajukan dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat baik melalui DPR-RI maupun Menteri Dalam Negeri agar menjadi pertimbangan dan pengkajian melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kajian dan pertimbangan dokumen visibility study dan karakteristik wilayah, maka sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008 telah disahkan Kabupaten Buru Selatan sebagai otonom baru bersama dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Khusus untuk Kabupaten Buru Selatan telah disahkan dan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan. Secara resmi penyelenggaraan efektifitas roda pemerintahan Kabupaten Buru Selatan mulai berjalan pada tanggal 16 September 2008.

Komposisi penduduk Kabupaten Buru Selatan terdiri dari orang-orang asli penghuni Pulau Buru kemudian penduduk yang berasal dari pulau Ambalau dan penduduk pendatang yang kebanyakan berasal dari etnis Jawa, Buton dan Bugis.

Kabupaten Buru Selatan adalah kabupaten yang tergolong muda dan baru mekar beberapa tahun lalu. Namun Kabupaten Buru Selatan ini memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Sayangnya, sumber daya alam ini belum di kelolah secara maksimal. Diharapkan ke depan seluruh potensi sumber daya ini dapat di kelolah lebih maksimal lagi sehingga dapat menjadi sebuah potensi yang tentunya sangat baik bagi kesejahteraan rakyat di daerah ini yang saat ini masih tertinggal dari daerah lainnya di Maluku.

4.1.2 Keadaan Geografis dan Ekonomi Kabupaten Buru selatan

Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, secara geografis letak daerah penelitian sebelah Utara dengan Kabupaten Buru dan Laut Seram, sebelah Selatan dengan Laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda, dan sebelah Timur dengan Kabupaten Buru dan Selat Manipa. Secara astronomis daerah penelitian terletak antara $20^{\circ}30'00''$ LS hingga $50^{\circ}50'00''$ LS dan $125^{\circ}00'00''$ BT hingga $127^{\circ}00'00''$ BT. Daerah penelitian mencakup areal seluas $5.060,0\text{km}^2$, dimana penyebaran terluasnya (93,95% dari luas kabupaten) berada pada Pulau Buru sedangkan luasan 6,05% sisanya berada pada Pulau Ambalau.

Kabupaten Buru Selatan, maka luas wilayah Kabupaten Buru telah berkurang menjadi $7.594,98\text{ Km}^2$ yang terdiri dari luas daratan $5.577,48\text{ Km}^2$ dan luas lautan $1.972,5\text{ Km}^2$ serta luas perairan $57,4\text{ Km}^2$ dengan panjang garis pantai $232,18\text{ Km}^2$. Sedangkan berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Buru berada

pada titik koordinat : o Bujur Timur : 125070' – 127021' BT o Lintang Selatan : 2025' – 3055' LS

4.2. Visi dan Misi Kabupaten Buru Selatan

a. Visi

Kabupaten Buru Selatan Yang Maju Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera, Demokratis Dan Berkeadilan.

b. Misi

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Karakter Dan Jati Diri Masyarakat
2. Mewujudkan Pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih (*good Governaince and Clean Government*)
3. Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis, Tentram, Aman dan Tertib
4. Peningkatkan Kesejahteraan sosial dan penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan.
5. Pengurangan kesenjangan antara wilayah dan Pembangunan Berkelanjutan.

4.3. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan

Organisasi pemerintah daerah merupakan wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah.

Struktur kelembagaan dan Tata Kerja di Tingkat Kabupaten Buru selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan

Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran
2011	2012	2013	2014	2015
327.907.570.02	340.219.200.707.68	397.752.695.513.93	397.625.569.235.93	11.075.938.022.29
14.258.302.762.99	27.991.806.869.68	6.965.699.088.93	6.838.572.810.93	499.560.860.329.5
4,19 %	4,33 %	3,01 %	4,33 %	3,01 %

Sumber : Data tetap di olah (2017)

Tabel 4.2 Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran
2011	2012	2013	2014	2015
4.609.696.000.00	1.100.000.000.00	10.658.171.556.00	3.670.200.000.00	90.994.670.503.00
23.787.694.762.99	600.000.000.00	10,629.212.392.00	2.600.000.000.00	77.915.522.089.01
62,19 %	59,53 %	32,96 %	59,53 %	32,96 %
318.565.567.000.00	5.120.000.000.00	5.000.000.000.00	8.524.402.834.00	6.250.000.000.00
22.197.852.778.00	8.904.928.030.92	5.403.664.443.64	4.774.402.834.00	2.500.000.000.00
2,13 %	2,71 %	2,16 %	2,71 %	2,16 %

Sumber : Data Tetap Di Olah (2017)

Tabel 4.3 Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran
2011	2012	2013	2014	2015
2.566.028.003.00	227.483.008.514.00	266.548.932.470.00	300.507.423.349.00	356.763.677.704.00
4.901.984573.03	212.038.787.609.00	252.734.230.803.00	272.331.912.060.00	539.913.520.278.00
78 %	77,51 %	83,17 %	71,78 %	77,51 %
4.667.234.997.00	119.022.168.264.00	166.627.523.037.00	243.322.815.674.00	356.763.677.704.00
999.328.720.00	96.230.164.224.00	133.664.484.622.00	174.106.787.900.00	240.425.101.024.00
21 %	22,39 %	16,73 %	28,21 %	70,45 %

Sumber : Data Tetap Di Olah (2017)

Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan

Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran	Tahun Anggaran
2011	2012	2013	2014	2015
8.000.000.00	1.490.176.000.00	3.395.342.000.00	6.341.952.000.00	11.897.220.000.00
1.268.520.02	2.249.936.502.76	2.582.488.449.29	11.075.938.022.29	12.878.290.354.05
3.268.520.02)	21.418.839.483.39	(523.268.520.02)	21.418.839.483,39	21.418.839.483.39
0 %	19,02 %	5,00 %	19,02 %	19,02 %
000.000.00	606.496.876.693.37	398.968.406.000.00	507.142.433.669.00	661.091.713.000.00
9.988.270.60	526.763.453.464.39	397.752.695.513.93	499.560.860.329.56	596.807.809.142.01
514.000.00	526.763.453464.39	813.514.000.00	526.763.453.464.39	526.763.453.464.39
3 %	15,13 %	1,48 %	15,13 %	15,13 %
566.028.003.00	227.483.008.514.00	266.548.932.470.00	300.507.423.349.00	386.170.989.296.00

901.984.573.03	212.038.717.609.00	252.734.230.803.00	272.331.912.060.00	359.913.520.278.00
4.04.429.97	418.506.141.00	7.664.04.429.97	418.423.506.141.00	418.423.506.141.00
%	18,60 %	7,52 %	18,60 %	18.60 %
667.234.997.00	119.022.168.264.00	166.627.523.037.00	243.322.815.674.00	356.763.677.704.00
99.328.720.00	96.230.164.224.00	133.664.484.622.00	174.106.787.900.00	240.425.101.024.00
667.906.277.00)	120.856.244.770.00	(16.667.906.277.00)	120.856.244.770.00	120.856.244.770.00
6 %	17.37 %	20,96 %	17.37 %	17,37 %

Sumber : Data Tetap Di Olah (2017)

4.4. Perhitungan Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Buru selatan

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan bersinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintahan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru selatan, ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern.

1. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{327.907.423.570.02}{14.258.302.762.99 + 0} \times 100\% \\ &= 4,19\% \end{aligned}$$

2. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2012

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{340.219.200.707.68}{27.991.806.869.68 + 0} \times 100\% \\ &= 4,33\% \end{aligned}$$

3. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2013

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{397.752.695.513.93}{6.965.699.088.93 + 0} \times 100\% \\ &= 3,01\% \end{aligned}$$

4. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2014

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman} \\
 & = \frac{397.625.569.235.93}{6.838.572.810.93 + 0} \times 100\% \\
 & = 4,33 \%
 \end{aligned}$$

5. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2015

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Kemandirian} & = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\
 & = \frac{11.075.938.022.29}{499.560.860.329.56 + 0} \times 100 \% \\
 & = 3.01 \%
 \end{aligned}$$

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi

menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

$$\begin{aligned} \text{a) Rasio Efektifitas 2011} &= \frac{4.609.696.000.00}{23.787.694.762.99} \times 100\% \\ &= 62,19\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2012} &= \frac{1.100.000.000.00}{600.000.000.00} \times 100\% \\ &= 59,53\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2013} &= \frac{10.658.171.556.00}{10.629.212.392.00} \times 100\% \\ &= 32,96\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2014} &= \frac{3.670.200.000.00}{2.600.000.000.00} \times 100\% \\ &= 59,53\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas 2015} &= \frac{90.994.670.503.00}{77.915.522.089.01} \times 100\% \\ &= 32,96\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Rasio Efisiensi 2011} &= \frac{318.565.567.000.00}{22.197.852.778.00} \times 100\% \\ &= 2,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2012} &= \frac{5.120.000.000.00}{8.904.928.030.92} \times 100\% \\ &= 2,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2013} &= \frac{5.000.000.000.00}{5.403.664.443.64} \times 100\% \\ &= 2,16\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2014} &= \frac{8.524.402.834.00}{4.774.402.834.00} \times 100\% \\ &= 2,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2015} &= \frac{6.250.000.000.00}{2.500.000.000.00} \times 100\% \\ &= 2,16\% \end{aligned}$$

3. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

1. Rasio Aktivitas tahun 2011:

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{212.566.028.003.00}{204.901.984.573.03} \times 100\% \\ &= 71,78\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{114.667.234.997.00}{97.999.328.720.00} \times 100\% \\ &= 28,21\% \end{aligned}$$

2. Rasio Aktivitas 2012 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{227.483.008.514.00}{212.038.717.609.00} \times 100\% \\ &= 77,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{119.022.168.264.00}{96.230.164.224.00} \times 100\% \\ &= 22,39\% \end{aligned}$$

3. Rasio Aktivitas 2013 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{266.548.932.470.00}{252.734.230.803.00} \times 100\% \\ &= 83,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{166.627.523.037.00}{133.664.484.622.00} \times 100\% \\ &= 16,73\% \end{aligned}$$

4. Rasio Aktivitas tahun 2014:

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{300.507.423.349.00}{272.331.912.060.00} \times 100\% \\ &= 71,78\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{243.322.815.674.00}{174.106.787.900.00} \times 100\% \\ &= 28,21\% \end{aligned}$$

5. Rasio Aktivitas 2015 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{356.763.677.704.00}{539.913.520.278.00} \times 100\% \\ &= 77,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{356.763.677.704.00}{240.425.101.024.00} \times 100\% \\ &= 70,45\% \end{aligned}$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

1. Rasio Pertumbuhan 2011 :

$$\begin{aligned} \text{a. PAD} &= \frac{1.998.000.000.00 - 2.521.268.520.02}{(523.268.520.02)} \\ &= 5,00\% \\ \text{b. Pendapatan} &= \frac{850.000.000,00 - 1.369.988.270.60}{813.514.000.00} \\ &= 1,48\% \\ \text{c. Belanja Operasi} &= \frac{212.566.028.003.00 - 204.901.984.573.03}{7.664.04.429.97} \\ &= 7,52\% \\ \text{d. Belanja Modal} &= \frac{114.667.234.997.00 - 97.999.328.720.00}{(16.667.906.277.00)} \end{aligned}$$

	=	-20,96 %
2. Rasio Pertumbuhan 2012 :		
a. PAD	=	$\frac{1.490.176.000.00 - 2.249.936.502.76}{21.418.839.483,39}$
	=	-19,02%
b. Pendapatan	=	$\frac{606.496.876.693,37 - 526.763.453.464,39}{526.763.453.464,39}$
	=	15,13 %
c. Belanja Operasi	=	$\frac{227.483.008.514.00 - 212.038.717.609.00}{418.423.506.141,00}$
	=	18,60 %
d. Belanja Modal	=	$\frac{119.022.168.264.00 - 96.230.164.224.00}{120.856.244.770,00}$
	=	-17,37 %
3. Rasio Pertumbuhan 2013 :		
e. PAD	=	$\frac{3.395.342.000.00 - 2.582.488.449.29}{(523.268.520.02)}$
	=	5,00 %
f. Pendapatan	=	$\frac{398.968.406.000.00 - 397.752.695.513.93}{813.514.000.00}$
	=	1,48 %
g. Belanja Operasi	=	$\frac{266.548.932.470.00 - 252.734.230.803.00}{7.664.04.429.97}$
	=	7,52 %
h. Belanja Modal	=	$\frac{166.627.523.037.00 - 133.664.484.622.00}{(16.667.906.277.00)}$
	=	-20,96 %

4. Rasio Pertumbuhan 2014 :

$$\begin{aligned} \text{e. PAD} &= \frac{6.341.952.000,00 - 11.075.938.022,29}{21.418.839.483,39} \\ &= -19,02\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f. Pendapatan} &= \frac{507.142.433.669,00 - 499.560.860.329,56}{526.763.453.464,39} \\ &= 15,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g. Belanja Operasi} &= \frac{300.507.423.349,00 - 272.331.912.060,00}{418.423.506.141,00} \\ &= 18,60\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{h. Belanja Modal} &= \frac{243.322.815.674,00 - 174.106.787.900,00}{120.856.244.770,00} \\ &= -17,37\% \end{aligned}$$

5. Rasio Pertumbuhan 2015 :

$$\begin{aligned} \text{i. PAD} &= \frac{11.897.220.000,00 - 12.878.290.354,05}{21.418.839.483,39} \\ &= -19,02\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{j. Pendapatan} &= \frac{661.091.713.000,00 - 596.807.809.142,01}{526.763.453.464,39} \\ &= 15,13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{k. Belanja Operasi} &= \frac{386.170.989.296,00 - 359.913.520.278,00}{418.423.506.141,00} \\ &= 18,60\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{l. Belanja Modal} &= \frac{356.763.677.704,00 - 240.425.101.024,00}{120.856.244.770,00} \\ &= -17,37\% \end{aligned}$$

Tabel.4.6 Mengkapitulasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan Pada Tahun 2011 – 2015.

Tahun	Rasio kemandirian	Rasio efektivitas	Rasio efesiensi	Rasio keserasian	Rasio pertumbuhan
2011	14.258.302.762.99	23.787.694.762.99	22.197852.778.00	97.999.328.720.00	(16.667.906.277.00)
2012	27.991.806.869.68	600.000.000.00	8.904.928.030.92	96.230.164.224.00	120.856.244.770.00
2013	6.965.699.088.93	10.629.212.392.00	5.403.664.443.64	133.664.484.622.00	7.664.044.429.97
2014	(41.687.805.354.00)	2.600.000.000.00	4.774.402.834.00	174.106.787.900.00	418.423.506.141.00
2015	499.560.860.329.56	77.915.522.089.01	2.500.000.000.00	240.424.101.024.00	21.418.839.483.39

Sumber : Data Tabel diolah (2017)

Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Buru Selatan di hitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Keandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}}$$

a. Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah

berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tingkat kemandirianya mengalami peningkatan hal ini bisa di lihat dari adanya peningkatan Rasio kemandirian di tahun 2011 4,19 % dan di tahun 2012 menjadi meningkat 4,33 % dan tahun 2013 mengalami penurunan 3,01 % di tahun 2014 menjadi 4,33 % dan di tahun 2015 menjadi 4,33 %. Dimana terjadi peningkatan emandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan tahun 2013 – 2015

Rasio Efektifitas dan Efesiensi Pemerintas Kabupaten Buru Selatan di hitung sebagai berikut :

b. Rasio Efektifitas dan Efesiensi

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintas daerah dalam perealisasi pendapatan asli daerah yang direncanaka dibandingkan dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD Yang Ditetapkan sesuai Potensi Daerah}}$$

Pemda di katakan mampumenjalankan tugasnya bila rasio yang di capai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Tetapi semakin tinggi Rasio Efektifitas berarti kemampuan daerah semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, Rasio ini perlu di dampingi oleh Rasio Efesiensi.

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa terjadi peningkatan Rasio Efektifitas dari Tahun 2011 menjadi peninkatan 62,19 % dan di tahun 2012 menurun hingga 59,53 % hingga di tahun 2013 bahkan lebi menurun hingga 32,96 % dan di tahu 2014 menjadi 59,53 % sedangkan di tahun 2015 menurun hingga 32,96 % diman terjadi peninkatan Efektifitas keuangan daerah yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2015.

c. Rasio Efesiensi

d. Rasio Efesiensi menggambaran perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Rasio Efisiensi mengalami penurunan dari tahun 2011 2,13 % dan di tahun 2012 menjadi 2,71 % dari tahun 2013 menjadi penurunan 2,16 % dan di tahun 2014 menjadi peningkatan 2,71 % dan di tahun 2015 menjadi penurunan 2,16 %.

e. Rasio Keserasiaan

Rasio Keaserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

$$\text{a.) Rasio Belanja rutin atau oprasi} = \frac{\text{Belanja Rutin/oprasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{b.) Rasio Belanja modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

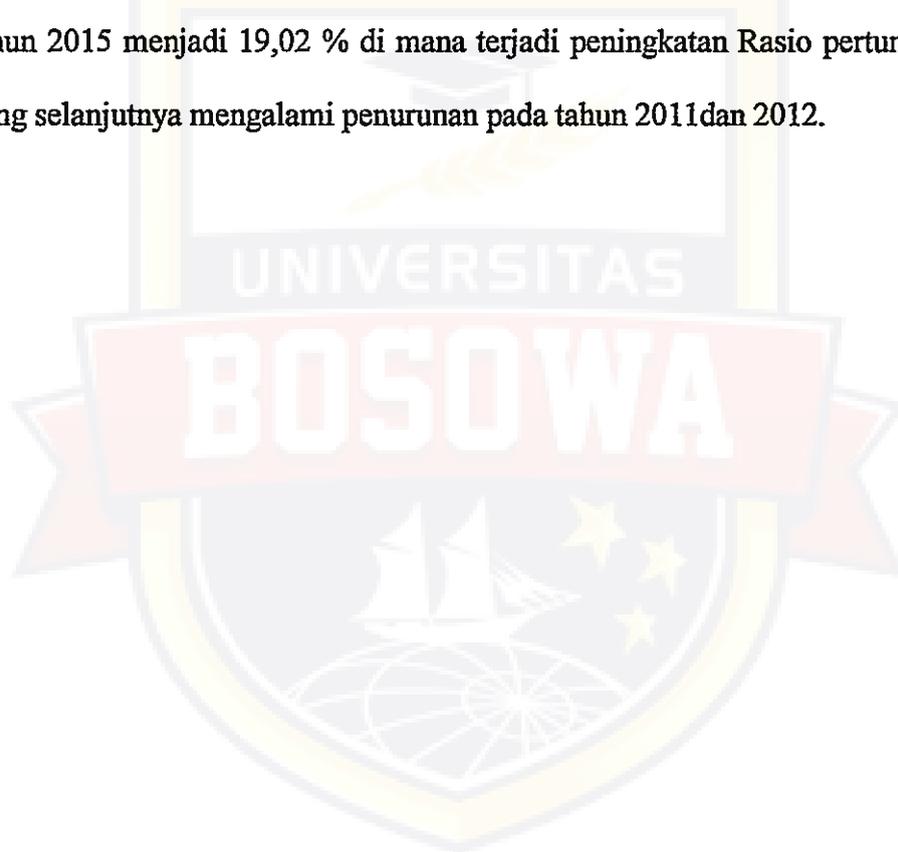
Rasio Keserasiaan nampak bahwa sebagian besar dana yang di miliki oleh pemerintah kabupaten buru selatan masi di gunakan utuk kebutuhan belanja oprasi walaupun terjadi penurunan dari tahun 2011, 20113 dan tahun 2015.

f. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur pertumbuhan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan eberhasilan yang telah di capai selama beberapa periode. Jika pertumbuhan utuk masin-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran suda di ketahui, maka dapat di gunakan utuk menilai potensi mana yang di peroleh memdapat perhatian.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t1 - \text{PAD } t0}{\text{PAD } t0}$$

Berdasarkan Rasio pertumbuhan dapat di ketahui bahwa padatahun 2011 PAD Pemerintah daerah kabupaten buru selatan mengalami pertumbuhab cukup rendah yakni sebesar 5,00 %dan tahun 2012 menjadi 19,02% dan di tahun 2013 menjadi 5,00 % dan di tahun 2014 lebih meningkat 19,02 % sedangkan di tahun 2015 menjadi 19,02 % di mana terjadi peningkatan Rasio pertumbuhan yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2011dan 2012.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19 % pada tahun 2011 menjadi 4,33% pada tahun 2012 dan 3,01% pada tahun 2013. Pada tahun 2014 menjadi 3,50% pada tahun 2015 menjadi 4,45% Dimana terjadi peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2012.
2. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2011 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2012 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisien 2,71%, dan pada tahun 2013 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%. pada Tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 38,73% rasio efisien sebesar 3,27% pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas 3,80% rasio efisien sebesar 2,50%

3. Sebagian besar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan masih diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi daripada belanja modal. Namun pelaksanaan pembangunan masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan terlihat dari rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun..
4. Pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2011-2015 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif.
5. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan selama periode penelitian (tahun 2011 sampai tahun 2015) kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintah serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan

asli daerah sehingga ketergantungan terhadap sumber daya ekstern dapat diminimalisir

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan sebaiknya memprioritaskan lagi pengalokasian dana yang dimiliki untuk belanja modal sehingga semakin bertambahnya sarana dan prasarana yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
5. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya serta dapat menjadi informasi yang relevan bagi pemakainnya

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darman, Syarif. 2015. Kinerja Keuangan Daerah. <http://theorykeuangandaerah.blogspot.co.id/2015/12>.diakses pada Tanggal 10 Maret 2017.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Mahsun, dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ke2: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006. *Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. CV. Tamita Utama, Jakarta. Pratama, Adipta Nur. 2013. Analisis Kinerja Keuangan dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta).<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/67658>. pada Tanggal 15 Maret 2017.
- Purwoko Adi pitoyo. 2010. ANALISA KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. <https://www.researchgate.net/publication/50858612>. diakses pada tanggal 15 Maret 2017
- Republik Indonesia.. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No, 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syukriy, Abdullah. 2011. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah. <https://syukriy.wordpress.com/2011/11/29>. diakses pada tanggal 10 Maret 2017.

Veithzal, Rivai. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Dari teori Ke Praktek*. Rajawali Pers; Jakart



The logo of Universitas Bosowa is a shield-shaped emblem. At the top, it features a graduation cap (mortarboard) above a stylized sunburst or flame. Below this, the word "UNIVERSITAS" is written in a grey, sans-serif font. The name "BOSOWA" is prominently displayed in the center in a large, bold, white serif font, set against a red, ribbon-like banner. The bottom portion of the shield contains a circular emblem with a globe and a star. The entire logo is rendered in a light, semi-transparent grey color.

LAMPIRAN

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buru selatan
Tahun Anggaran 2011**

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Lebih/Kurang
2	3	4	5
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah	1.998.000.000,00	2.521.268.520,02	(523.268.520,02)
Pendapatan Pajak Daerah	500.000.000,00	138.684.778,00	(361.315.222,00)
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan c	500.000.000,00	138.684.778,00	(361.315.222,00)
Pajak Lain lain Daerah		-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	648.000.000,00	1.012.595.471,42	(364.595.471,42)
Retribusi Jasa Umum	648.000.000,00	1.012.595.471,42	(364.595.471,42)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	
Lain --lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	850.000.000,00	1.369.988.270,60	(519.988.270,60)
Jasa Giro	850.000.000,00	556.474.270,60	293.525.729,40
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		813.514.000,00	
DANA PERIMBANGAN	318.565.567.000,00	319.625.821.174,00	1.060.254.174,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.038.258.280,00	22.197.852.778,00	3.109.594.498,00

Dana Bagi Hasil Pajak	13.663.258.280,00	15.872.359.890,00	2.209.101.610,00	
Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan	13.063.258.280,00	15.322.922.670,00	2.209.101.610,00	
Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan	-	-	-	
Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	600.000.000,00	549.437.220,00	(50.562.780,00)	
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat	-	-	-	
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Provinsi	-	-	-	
Bagian Hasil Dari PBB Pertambangan Migas	-	-	-	
Bagian Hasil Dari PBB Pertambangan	-	-	-	
Dana Bukan Hasil Pajak (Sumber Daya Alam)	5.425.000.000,00	6.325.492.888,00	900.492.888,00	
Bagi Hasil dari luran hak perusahaan Hutang	-	-	-	
Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutang	2.300.000.000,00	2.982.688.343,00	682.688.343,00	
Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	3.000.000.000,00	3.187.359.586,00	187.359.586,00	
Bagi Hasil Dari Pungutan Perusahaan Perikanan	125.000.000,00	155.444.959,00	30.444.959,00	
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak dan gas Bumi	-	-	-	

Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutang	2.300.000.000,00	2.982.688.343,00	682.688.343,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	222.107.000.000,00	221.884.331.000,00	(222.939.000,00)
Dana Alokasi Umum	222.107.000.000,00	221.884.331.000,00	(222.939.000,00)
Tranfer Pemerintah Pusat-Lainnya	30.595.338.720,00	30.334.278.720,00	(261.060.000,00)
Dana Penyesuaian	30.595.338.720,00	30.334.278.720,00	(261.060.000,00)
Dana Penyesuaian	30.595.338.720,00	30.334.278.720,00	(261.060.000,00)
Dana Otonomi Khusus	-	-	
Dana Otonomi Khusus	-	-	
Transfer Pemerintah Provinsi	3.000.000.000,00	983.934.956,00	(2.016.065.044,00)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3.000.000.000,00	983.934.956,00	(2.016.065.044,00)
			-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	3.000.000.000,00	983.934.956,00	(2.016.065.044,00)
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.200.000.000,00	981.234.956,00	(218.765.044,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	-	(1.500.000.000,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat	300.000.000,00	2.700.000,00	(297.300.000,00)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
2	3	4	5
Dana Alokasi Khusus (DAK)	43.774.700.000,00	44.225.423.720,00	450.723.720,00
Dana Alokasi Khusus	43.774.700.000,00	44.225.423.720,00	450.723.720,00

Dana Alokasi Khusus	43.774.700.000,00	44.225.423.720,00	450.723.720,00
		-	
LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.750.000.000,00	5.760.333.876,00	(1.989.666.124,00)
Pendapatan Hibah	7.750.000.000,00	5.760.333.876,00	(1.989.666.124,00)
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	-	
Pemerintah Pusat	-	-	
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	7.750.000.000,00	5.760.333.876,00	(1.989.666.124,00)
Pemerintah Provinsi Maluku	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
Pemerintah Kabupaten Buru	750.000.000,00	760.333.876,00	10.333.876,00
Bantuan Hibah Untuk Pilkada	-	-	
-Dari Kabupaten Induk		-	
-Dari Provinsi Maluku		-	
Pendapatan Dana Darurat	-		
JUMLAH PENDAPATAN	328.313.567.000,00	327.907.423.570,02	(406.143.429,98)

No Urut	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPRASI	212.566.028.003,00	204.901.984.573,03	7.664.043.429,97
1.1	Belanja Pegawai	97.037.679.129,00	97.494.307.903,03	456.628.774,03
1.2	Belanja Barang	88.516.148.874,00	81.058.528.800,00	(7.457.620.074,00)
1.3	Belanja Bunga	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	2.950.000.000,00	2.502.002.870,00	(447.997.130,00)
1.5	Belanja Hibah	7.700.000.000,00	7.800.000.000,00	100.000.000,00
1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.620.000.000,00	6.284.945.000,00	(335.055.000,00)
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	9.742.200.000,00	9.762.200.000,00	20.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL	114.667.234.997,00	97.999.328.720,00	(16.667.906.277,00)
2.1	Blanja Tanah	4.151.660.000,00	1.767.000.000,00	(2.384.660.000,00)
2.2	Blanja Peralatan Dan Mesin	24.881.920.720,00	27.168.002.400,00	2.286.081.680,00
2.3	Blanja Gedung Dan Bangunan	26.918.521.026,00	20.358.069.160,00	(6.560.451.866,00)
2.4	Blanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	49.173.589.491,00	44.309.155.160,00	(4.864.434.331,00)
2.5	Blanja Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)
2.6	Blanja Aset Lainnya	9.341.543.760,00	4.397.102.000,00	(4.944.441.760,00)
2	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.850.000.000,00	5.978.111.514,00	128.111.514,00
2	Belanja Tidak Terduga	5.850.000.000,00	5.978.111.514,00	128.111.514,00
	JUMLAH BELANJA	333.083.263.000,00	308.879.424.807,03	(24.203.838.192,97)

1	2	3	4	5
2	TRANFER	-	-	
2.1	TRANFER BAGI HASIL KE DESA	-	-	
	Bagi Hasil Pajak	-	-	
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	
	SURPLUS (DIFISIT)	(4.769.696.000,00)	19.027.998.762,00	14.258.302.762,99
3	PEMBIYAAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN	5.619.696.000,00	5.609.696.000,00	10.000.000,00
1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran Yang Lalu	5.609.696.000,00	5.609.696.000,00	
1.2	Pencaruian Dana Cadangan	-	-	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	-	-	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000,00		10.000.000,00
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	
	Jumlah	5.619.696.000,00	5.609.696.000,00	

No Urut	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5
3.2	PENGELUARAN	850.000.000,00	850.000.000,00	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Invenstasi) Pemerintah Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	-
	PEMBERIAN NETTO	4.769.696.000,00	4.769.696.000,00	10.000.000,00
	Sisah Lebih Piutang Anggaran (SILPA)	-	23.787.694.762,99	
2	PENGELUARAN	850.000.000,00	850.000.000,00	-
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
2.2	Penyertaan Modal (Invenstasi) Pemerintah Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	-
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	-
	PEMBERIAN NETTO	4.769.696.000,00	4.769.696.000,00	10.000.000,00
	Sisah Lebih Piutang Anggaran (SILPA)	-	23.787.694.762,99	

umber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011

**Tabel 2 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buru selatan
Tahun Anggaran 2012**

No urut	Uraian	Anggaran 2012	Realisasi 2012	(%)
	2	3	4	5
	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah	<u>1.490.176.000.00</u>	<u>2.249.936.502.76</u>	<u>150.96</u>
	Pendapatan Pajak Daerah	300.000.000.00	609.009.652.00	203.06
	Pendapatan Ritribusi Daerah	225.000.000.00	249.144.425.00	110.74
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	40.176.000.00	40.176.957.00	100.05
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	925.000.000.00	1.351.605.468.76	146.19
	Transfer Penerimaan Pusat/ Perimbangan	<u>317.218.225.512.00</u>	<u>319.662.116.549.00</u>	<u>100.75</u>
	Dana Bagi Hasil Pajak	16.680.592.512.00	17.533.936.414.00	105.19
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	6.375.000.000.00	7.965547.135.00	124.59
	Dana Alokasi Umum	259.458.763.000.00	259.458.763.000.00	100.09
	Dana Alokasi Khusus	34.703.870.000.00	34.703.870.000.00	100.09
	Trnsfer Pemerintah Pusat -- Lainnya	<u>6.366.618.000.00</u>	<u>6.338.118.000.00</u>	<u>99.534</u>
	Dana Otonomi Khusus	-	-	
	Dana Penyesuaiaan	6.366.618.000.00	6.338.118.000.00	99.534
	Transfer Pemerintah Provinsi	<u>2.619.276.000.00</u>	<u>3.064.101.620.00</u>	<u>116.58</u>

	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.619.276.000.00	3.064.101.620.00	116.58
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>5.210.000.000.00</u>	<u>8.904.928.030.92</u>	<u>170.75</u>
	Pendapatan Hibah	5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	100.86
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	
	Pendapatan Lainnya	210.000.000.00	3.904.928.030.92	1.859.52
	Jumlah	<u>332.904.295.512.00</u>	<u>340.219.200.702.68</u>	<u>102.29</u>
	Belanja	<u>227.483.008.514.00</u>	<u>212.038.717.609.00</u>	<u>93.286</u>
	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	123.747.641.573.00	117.765.822.202.00	95.851
	Belanja Barang	88.213.322.941.00	79.693.801.407.00	90.095
	Belanja Bunga	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	265.000.000.00	100.000.000.00	37.539
	Belanja Bantuan Sosial	5.114.844.000.00	4.368.044.000.00	85.295
	Belanja Bantuan Keuangan	10.142.200.000.00	10.111.050.000.00	99.026
o ut	Uraian	Anggaran 2012	Realisasi 2012	(%)
	Belanja Modal	<u>119.022.168.264.00</u>	<u>96.230.164.224.00</u>	<u>80.853</u>
	Belanja Tanah	6.154.020.000.00	6.110.681.000.00	99.361
	Belanja Peralatan Dana dan Mesin	28.058.571.281.00	34.393.925.232.00	86.943
	Belanja Gedung dan Bangunan	36.858.627.483.00	25.496.568.832.00	69.127
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.689.087.000.00	37.129.504.160.00	83.087
	Belanja Aset Tetap Lainnya	603.862.500.00	582.800.000.00	96.534
	Belanja Aset Lainnya	2.658.000.000.00	2.516.685.000.00	94.685

	Belanja Tidak Terduga	<u>4.086.813.496.00</u>	<u>3.958.512.000.00</u>	<u>96.059</u>
	Belanja Tidak Terduga	4.086.813.496.00	3.958.512.000.00	96.059
	Jumlah	<u>350.591.990.274.00</u>	<u>312.227.393.833.00</u>	<u>89.094</u>
	Transfer			
	Transfer Bagi Hasil Ke Desa	-	-	
	Bagi Hasil Pajak	-	-	
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	
	Suplus / (Defisit)	<u>(17.687.694.762.00)</u>	<u>27.991.806869.68</u>	<u>(158.28)</u>
	Pembiayaan			
	Penerimaan Daerah	<u>23.787.694.762.00</u>	<u>22.151.304.487.90</u>	<u>93.685</u>
	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	23.787.694.762.00	22.098.482.487.90	92.742
	Pencarian dana cadangan	-	-	
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	52.822.000.00	
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	
	Jumlah	<u>23.787.694.762.00</u>	<u>22.151.304.487.90</u>	<u>93.547</u>
	Pengeluaran Daerah	<u>1.100.000.000.00</u>	<u>600.000.000.00</u>	<u>54.095</u>
	Pembantuan dana cadangan	-	-	

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	1.100.000.000.00	600.000.000.00	54.095
Pembayaran pokok utang	-	-	
Pemberian pinjaman daerah	-	-	
.....	-	-	
Jumlah	<u>1.100.000.000.00</u>	<u>600.000.000.00</u>	<u>59.549</u>
Pembiayaan Netto	<u>22.687.694.762.00</u>	<u>21.551.304.487.90</u>	<u>97.387</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	5.000.000.000.00	49.543.111.357.58	99.289

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012



**Tabel 3 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buru selatan
Tahun Anggaran 2013**

	Uraian	Ref	Anggaran 2013	Retribusi 2013	(%)
1	2		3	4	5
1	Pendapatan	4.2.1			
	Pendapatan asli daerah	4.2.1.a	<u>3.395.342.000.00</u>	<u>2.582.488.449.29</u>	<u>76.06</u>
1.1	Pendapatan pajak daerah	4.2.1.a1	600.000.000.00	618.060.710.00	103.01
1.2	Pendapatan retribusi daerah	4.2.1.a2	269.800.000.00	308.481.625.00	114.34
1.3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	4.2.1.a3	90.176.000.00	69.866.975.00	77.48
1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.2.1.a4	2.435.366.000.00	1.586.079.139.29	65.13
2	Transfer pemerinta pusat/ perimbangan	4.2.1.b	<u>380.275.071.000.00</u>	<u>378.942.398.809.00</u>	<u>99.65</u>
2.1	Dana bagi hasil pajak		17.080.592.000.00	17.500.197.230.00	102.46
2.2	Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)		7.375.000.000.00	5.622.722.579.00	76.24
2.3	Dana alokasi umum		294.019.779.000.00	294.019.779.000.00	100.00
2.4	Dana alokasi khusus		61.799.700.000.00	61.799.700.000.00	100.00
3	Transfer pemerintah pusat lainnya	4.2.1.c	<u>7.468.717.000.00</u>	<u>7.643.317.000.00</u>	<u>102.34</u>
3.1	Dana otonomi khusus		-	-	
3.2	Dana penyesuaian		7.468.717.000.00	7.643.317.000.00	102.34
4	Trnsfer pemerintah provinsi	4.2.1.d	<u>2.829.276.000.00</u>	<u>3.180.826.812.00</u>	<u>112.43</u>
4.1	Pendapatan bagi hasil pajak		2.829.276.000.00	3.180.826.812.00	112.43

1	2		3	4	5
4.2	Pendapatan bagi hasil lainnya		-	-	-
5	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	4.2.1.e	<u>5.000.000.000.00</u>	<u>5.403.664.443.64</u>	<u>108.07</u>
5.1	Pendapatan hibah		5.000.000.000.00	5.000.000.000.00	100.00
5.2	Pendapatan dana darurat		-	-	-
5.3	Pendapatan lainnya		-	403.664.443.64	-
	Jumlah pendapatan		<u>398.968.406.000.00</u>	<u>397.752.695.513.93</u>	<u>99.70</u>
2	Belanja	4.2.2			
2.1	Belanja operasi	4.2.2.a	<u>266.548.932.470.00</u>	<u>252.734.230.803.00</u>	<u>94.82</u>
1.1	Belanja pegawai		140.041.200.581.00	137.157.694.913.00	97.94
1.2	Belanja barang		106.948.131.889.00	96.809.254.890.00	90.52
1.3	Belanja bunga		-	-	-
1.4	Belanja subsidi		-	-	-
1.5	Belanja hibah		4.636.400.000.00	4.313.141.000.00	93.03
1.6	Belanja bantuan sosial		4.376.740.000.00	10.077.400.000.00	96.81
1.7	Belanja bantuan keuangan		10.402.200.000.00	10.077.400.000.00	96.88
2	Belanja modal	4.2.2.b	<u>166.627.523.037.00</u>	<u>133.664.484.622.00</u>	<u>80.22</u>
2.1	Belanja tanah		4.995.913.000.00	4.902.100.000.00	98.12
2.2	Belanja peralatan dan mesin		29.492.686.291.00	26.846.865.270.00	91.03
2.3	Belanja gedung dan bangunan		58.999.186.096.00	44.478.607.605.00	75.39
2.4	Belanja jalan, irigasi dan jaringan		70.395.052.650.00	55.223.405.947.00	78.45
2.5	Belanja aset tetap lainnya		221.685.000.00	210.550.000.00	94.98
2.6	Belanja aset lainnya		2.523.000.000.00	2.002.955.800.00	79.39

3	Belanja Tidak Terduga	4.2.2.c	<u>4.676.889.937.00</u>	<u>4.388.281.000.00</u>	<u>93.83</u>
3.1	Belanja tidak terduga		4.676.889.937.00	4.388.281.000.00	93.83
	Jumlah belanja		<u>437.853.345.444.00</u>	<u>390.786.996.425.00</u>	<u>89.25</u>
1	2		3	4	5
4	Transfer				
4.1	Trnsfer Bagi Hasil Ke Desa		-	-	-
4.1.1	Bagi hasil pajak		-	-	-
4.1.2	Bagi hasil restribusi		-	-	-
4.1.3	Bagi hasil pendapatan lainnya		-	-	-
	Suplus/ (Defisit)		<u>(38.884.939.444.00)</u>	<u>6.965.699.088.93</u>	<u>(17.91)</u>
3	Pembiayaan	4.2.4			
3.1	Penerimaan daerah	4.2.4.a	<u>49.543.111.000.00</u>	<u>48.965.699.088.93</u>	<u>98.52</u>
3.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SIPA)		49.543.111.000.00	48.965.699.088.93	98.50
3.1.2	Pencarian dana cadangan		-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan		-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		-	6.533.000.00	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah		-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		<u>49.543.111,000,00</u>	<u>48.808.337.495.08</u>	<u>98.52</u>
2	Pengeluaran Daerah	4.2.4.b	<u>10.658.171.556.00</u>	<u>10.629.212.392.08</u>	<u>99.73</u>
2.1	Pembantuan dana cadangan		-	-	-

1	2		3	4	5
2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		3.600.000.000.00	3.500.000.000.00	97.22
2.3	Pembayaran pokok utang		6.458.171.556.00	6.529.212.392.00	101.10
2.4	Pemberian pinjaman daerah		600.000.000.00	600.000.000.00	100.00
2.5		-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		<u>10.658.171.556.00</u>	<u>10.629.212.392.00</u>	<u>99.73</u>
	Pembiayaan Netto	4.2.4.c	<u>38.884.939.444.00</u>	<u>38.179.125.103.08</u>	<u>98.18</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	4.2.5	=	<u>45.144.824.192.01</u>	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013

**Tabel 4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buru selatan
Tahun Anggaran 2014**

Uraian	Ref	Anggaran 2014	Realisasi 2014	(%)	Realisasi 2014
2		3	4	5	6
Pendapatan	4.2.1				
Pendapatan Asli Daerah	4.2.1.a	<u>6.341.952.000.00</u>	<u>11.075.938.022.29</u>	<u>174.65</u>	<u>2.455.362.171.29</u>
Pendapatan pajak daerah	4.2.1.a.1	893.000.000.00	1.707.818.583.00	191.25	618.060.710.00
Pendapatan retribusi daerah	4.2.1.b.2	416.165.000.00	386.200.361.00	92.80	308481.625.00
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.2.1.c.3	410.421.000.00	410.421.819.00	100.00	69.866.975.00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.2.1.d.4	4.622.366.000.00	8.571.497.259.29	185.44	1.458.952.861.29
Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan	4.2.1.b	<u>469.184.354.035.00</u>	<u>467.218.168.688.00</u>	<u>99.58</u>	<u>378.942.398.809.00</u>
Dana bagi hasil pajak		9.163.530.699.00	10.404.662.062.00	113.54	17.500.197.230.00
Dana bagi hasil bukan pajak (Sumber daya alam)		17.162.560.665.00	13.955.243.955.00	81.31	5.622.722.579.00
Dana alokasi umum		360.928.032.671.00	360.928.032.671.00	100.00	294.019.779.000.00
Dana alokasi		81.930.230.000.00	81.930.230.000.00	100.00	61.799.700.000.00

khusus					
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	4.2.1.c	<u>17.506.740.000.00</u>	<u>13.333.139.000.00</u>	<u>76.16</u>	<u>7.643.317.000.00</u>
Dana otonomi khusus		-	-	-	-
Dana penyesuaian		17.506.740.000.00	13.333.139.000.00	76.16	7.643.317.000.00
Transfer Pemerintah Provinsi	4.2.1.d	<u>5.5.84.984.800.00</u>	<u>3.159.211.785.27</u>	<u>56.57</u>	<u>3.180.826.812.00</u>
Pendapatan bagi hasil pajak		4.094.217.800.00	2.712.332.859.00	66.25	3.180.826.812.00
Pendapatan bagi hasil lainnya		1.490.767.000.00	446.878.926.27	29.98	-
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.2.1.e	8.524.402.834.00	4.774.402.834.00	56.01	5.403.664.443.64
Pendapatan hibah		6.170.000.000.00	300.000.000.00	44.44	5.000.000.000.00
Pendapatan dana darurat		-	-	-	-
Pendapatan lainnya		1.774.402.834.00	1.774.402.834.00	100.00	403.664.443.64
Jumlah Pendapatan		<u>507.142.433.669.00</u>	<u>499.560.860.329.56</u>	<u>98.51</u>	<u>397.625.569.235.93</u>
Belanja	4.2.2				
Belanja Operasi	4.2.2.a	<u>300.507.423.349.00</u>	<u>272.331.912.060.00</u>	<u>90.62</u>	<u>252.734.230.803.00</u>
Belanja pegawai		154.183.718.724.00	140.081.068.927.00	90.85	137.157.694.913.00
Belanja barang		115.767.479.791.00	104.134.405.133.00	89.95	96.809.254.890.00

Belanja bunga		-	-	-	-
Belanja subsidi		186.880.000.00	186.880.000.00	-	-
Belanja hibah		8.222.950.000.00	7.576.823.000.00	92.14	4.313.141.000.00
Belanja bantuan sosial		9.744.194.834.00	8.225.485.000.00	84.41	4.376.740.000.00
Belanja keuangan		12.402.200.000.00	12.127.250.000.00	97.78	10.077.400.000.00
Belanja Modal	4.2.2.b	<u>243.322.815.674.00</u>	<u>174.106.787.900.00</u>	<u>71.55</u>	<u>133.664.484.622.00</u>
Belanja tanah		9.165.578.162.00	9.003.378.162.00	98.23	4.902.100.000.00
Belanja peralatan dan mesin		21.955.180.471.00	17.203.696.944.00	78.36	26.846.865.270.00
Belanja gedung dan bangunan		99.653.801.632.00	66.858.149.973.00	67.09	44.478.607.60500
Belanja jalan, irigasi dan jaringan		104.888.798.562.00	74.864.887.901.00	71.38	55.223.405.947.00
Belanja aset tetap lainnya		5.868.530.987.00	5.557.118.400.00	94.69	210.550.000.00
Belanja aset lainnya		1.790.925.860.00	619.556.520.00	34.59	2.002.955.800.000
Belanja Tidak Terduga	4.2.2.c	<u>5.000.000.000.00</u>	<u>4.916.328.500.00</u>	<u>98.33</u>	<u>4.388.281.000.00</u>
Belanja Tidak Terduga		5.000.000.0000.00	4.916.328.500.00	98.33	4.388.281.000.00
Jumlah Belanja		<u>548.830.239.023.00</u>	<u>451.355.028.460.00</u>	<u>82.24</u>	<u>390.786.996.42500</u>
Transfer					
Tranfer Bagi Hasil Ke desa		-	-	-	-
Bagi hasil pajak		-	-	-	-
Bagi hasil		-	-	-	-

retribusi					
Bagi hasil pendapatan lainnya		-	-	-	-
Suplus/ (Defisit)	4.2.3	<u>(41.687.805.354.00)</u>	<u>48.205.831.869.56</u>	<u>(115.65)</u>	<u>6.838.572.810.93</u>
Pembiayaan	4.2.4				
Penerimaan Daerah	4.2.4.a	<u>45.358.005.354.00</u>	<u>45.358.005.354.00</u>	<u>100.00</u>	<u>48.808.337.495.08</u>
Penggunaan sisa le Bi pituan anggaran (Silpa)		45.358.005.354.00	45.358.005.354.00	100.00	48.801.784.495.08
Pencarian dana cadangan		-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah		-	-	-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		-	-	-	6.553.000.00
Penerimaan piutang daerah		-	-	-	-
Jumlah penerimaan pembiayaan		<u>45.358.005.354.00</u>	<u>45.358.005.354.00</u>	<u>100.00</u>	<u>48.808.337.495.08</u>

Uraian	Ref	Anggaran 2014	Realisasi 2014	(%)	Realisasi 2014
Pengeluaran Daerah	4.2.4.b	<u>3.670.200.000.00</u>	<u>2.600.000.000.00</u>	<u>70.84</u>	<u>10.629.212.392.00</u>
Pembentukan dana cadangan		-	-	-	-
Penyertaan modal (Invenstasi pemerintah daerah		3.000.000.000.00	2.000.000.000.00	66.67	3.500.000.000.00
Pembayaran pokok utang		-	-	-	6.529.212.392.00
Pemberian pinjaman daerah		670.200.000.00	600.000.000.00	89.53	600.000.000.00
.....		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		<u>3.670.200.000.00</u>	<u>2.600.000.000.00</u>	<u>70.84</u>	<u>10.629.212.392.00</u>
Pembiayaan Netto	4.2.4.c	<u>41.687.805.354.00</u>	<u>42.758.005.354.00</u>	<u>102.57</u>	<u>38.179.125.103.08</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	4.2.5	-	90.963.837.223.56		45.017.697.914.01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014

**Tabel 5 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buru selatan
Tahun Anggaran 2015**

Uraian	Ref	Anggaran 2015	Realisasi 2015	(%)	Realisasi 2015
2		3	4	5	6
Pendapatan	4.2.1				
Pendapatan Asli Daerah	4.2.1.a	<u>11.897.220.000.00</u>	<u>12.878.290.354.05</u>	<u>108.25</u>	<u>11.075.938.022.29</u>
Pendapatan pajak daerah	4.2.1.a1	1.646.484.300.00	1.301.998.930.00	79.08	1.707.818.583.00
Pendapatan retribusi daerah	4.2.1.a2	520.800.000.00	314.168.462.00	60.32	386.200.361.00
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.2.1.a3	-	-		410.421.819.00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	4.2.1.a4	9.729.935.700.00	11.262.122.962.05	115.75	8.571.497.259.29
Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan	4.2.1.b	<u>600.746.079.000.00</u>	<u>536.142.858.589.00</u>	<u>89.25</u>	<u>467.218.168.688.00</u>
Dana bagi hasil pajak		9.889.156.250.00	10.813.749.100.00	109.35	10.404.662.062.00
Dana bagi hasil bukan pajak (Sumber daya alam)		19.282.548.750.00	15.112.818.489.00	78.38	13.955.243.955.00
Dana alokasi umum		381.666.874.000.00	381.666.874.000.00	100.00	360.928.032.671.00

Dana alokasi khusus		189.907.500.000.00	128.549.417.000.00	67.69	81.930.230.000.00
Transfer Pemerintah Pust Lainnya	4.2.1.c	<u>37.035.882.000.00</u>	<u>36.997.369000.00</u>	<u>99.90</u>	<u>13.333.139.000.00</u>
Dana otonomi khusus		-	-	-	-
Dana penyesuaian		37.035.882.000.00	36.997.369000.00	99.90	13.333.139.000.00
Transfer Pemerintah Provinsi	4.2.1.d	<u>5.162.532.000.00</u>	<u>8.289.291.198.00</u>	<u>160.57</u>	<u>3.159.211.785.27</u>
Pendapatan bagi hasil pajak		5.162.532.000.00	8.289.291.198.00	160.57	2.712.332.859.00
Pendapatan bagi hasil lainnya		-	-		446.878.926.27
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.2.1.e	<u>6.250.000.000.00</u>	<u>2.500.000.000.00</u>	<u>40.00</u>	<u>4.774.402.834.00</u>
Pendapatan hibah		3.750.000.000.00	-	-	3.000.000.000.00
Pendapatan dana darurat		-	-	-	-
Pendapatan lainnya		2.500.000.000.00	2.500.000.000.00	100.00	1.774.402834.00
Jumlah Pendapatan		<u>661.091.713.000.00</u>	<u>596.807.809.142.01</u>	<u>90.28</u>	<u>499.560.860.329.56</u>

Belanja	4.2.2				
Belanja Operasi	4.2.2.a	<u>386.170.989.296.00</u>	<u>359.913.520.578.00</u>	<u>93.20</u>	<u>272.331.912.060.00</u>
Belanja pegawai		146.609.795.000.00	137.073.422.848.00	93.50	140.081.068.927.00
Belanja barang		171.152.417.296.00	162.055.929.311.00	94.69	104.134.405.133.00
Belanja bunga		-	-	-	
Belanja subsidi		747.520.000.00	742.000.000.00	99.26	186.880.000.00
Belanja hibah		26.677.500.000.00	25.545.625.000.00	95.76	7.576.823.000.00
Belanja bantuan sosial		4.855.248.000.00	4.167.457.612.00	85.83	8.225.485.000.00
Belanja keuangan		36.128.509.000.00	30.329.085.507.00	83.95	12.127.250.000.00
Belanja Modal		<u>356.763.677.704.00</u>	<u>240.425.101.024.00</u>	<u>67.39</u>	<u>174.106.787.900.00</u>
Belanja tanah		6.594.524.702.00	6.445.808.000.00	97.74	8.992.128.162.00
Belanja peralatan dan mesin		36.276.808.802.04	33.406.670.632.00	92.09	18.998.738.944.00
Belanja gedung dan bangunan		76.768.938.729.96	54.050.420.645.00	70.41	66.869.399.373.00
Belanja jalan, irigasi dan jaringan		228.613.484.601.00	139.212.046.742.00	60.89	74.864.887.901.00
Belanja aset tetap lainnya		8.509.921.589.00	7.310.155.005.00	85.90	3.792.076.400.00
Belanja aset lainnya		-	-	-	589.556.520.00
Belanja Tidak Terduga		<u>5.000.000.000.00</u>	<u>6.548.336.254.00</u>	<u>130.97</u>	<u>4.916.328.500.00</u>
Belanja Tidak Terduga		5.000.000.000.00	6.548.336.254.00	130.97	4.916.328.500.00
Jumlah Belanja		<u>747.934.667.000.00</u>	<u>606.886.957.556.00</u>	<u>81.14</u>	<u>451.355.028.460.00</u>

	Transfer		-	-	-	-
4	Tranfer Bagi Hasil Ke desa		-	-	-	-
1	Bagi hasil pajak		-	-	-	-
2	Bagi hasil restribusi		-	-	-	-
3	Bagi hasil pendapatan lainnya		-	-	-	-
	Suplus/ (Defisit)		<u>(86.842.954.000.00)</u>	<u>(10.079.148.413.00)</u>	<u>11.61</u>	<u>48.205.831.869.56</u>

Uraian	Ref	Anggaran 2015	Realisasi 2015	(%)	Realisasi 2015
2		3	4	5	6
Pembiayaan	4.2.4				
Penerimaan Daerah	4.2.4.a	<u>90.963.837.000.00</u>	<u>90.994.670.503.00</u>	<u>100.03</u>	<u>45.358.005.354.00</u>
Penggunaan sisa le Bi pituan anggaran (Silpa)		90.963.837.000.00	90.963.837.000.00	100.00	45.358.005.354.00
Pencarian dana cadangan		-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah		-	-	-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		-	30.883.503.00	-	-
Penerimaan piutang		-	-	-	-

daerah					
Jumlah penerimaan pembiayaan		90.963.837.000.00	90.994.670.503.00	100.03	45.358.005.354.00

Pengeluaran Daerah	4.2.4.b	<u>4.120.883.000.00</u>	<u>3.000.000.000.00</u>	<u>27.80</u>	<u>2.600.000.000.00</u>
Pembetulan dana cadangan		-	-	-	-
Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah		3.600.000.000.00	3.000.000.000.00	83.33	2.000.000.000.00
Pembayaran pokok utang		520.883.000.00	-		-
Pemberian pinjaman daerah		-	-	-	.600.000.000.00
.....		-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		<u>4.120.883.000.00</u>	<u>3.000.000.000.00</u>	<u>72.80</u>	<u>2.600.000.000.00</u>
Pembiayaan Netto	4.2.4.c	86.842.954.000.00	87.994.670.503.00	101.33	42.758.005.354.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	4.2.5	-	<u>77.915.522.089.01</u>		<u>90.963.837.223.56</u>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLOTIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. Raya Mangga Dua - Namrole, Tlp 091322135

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 074/11/BKBPPM/1/2017

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedomen Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.G/2/12 tanggal 5 juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- Menimbang :
- Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar Nomor : A-093/FE/UNIBOS/1/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal Izin dan Permohonan Pengambilan Data Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama : ROSMINA SATURU
Stanbuk : 4513013074
Fakultas : Ekonomi
Prodi Studi : Akuntansi
Untuk : 1) Melakukan Penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :
"Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Keuangan Kabupaten Buru Selatan"
- 2) Lokasi : BPKAD Kab. Buru Selatan
 - 3) Waktu/Lama Penelitian : 31 Januari s/d 31 Februari 2017
 - 4) Anggota : -
 - 5) Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebag. berikut :

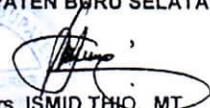
- a. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
- b. Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku
- c. Surat izin ini hanya berlaku bagi kegiatan penelitian
- d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
- e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
- f. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
- g. Menyampaikan 1 (satu) Eks hasil penelitian kepada Bupati Buru Selatan Cq Kaban Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Buru Selatan.
- h. Surat izin ini berlaku sampai dengan 31 Februari 2017 serta dicabut apabila terdapat penyimpangan pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Namrole, 31 Januari 2017

An. BUPATI BURU SELATAN

Pt. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN BURU SELATAN,


Drs. ISMID THIQ. MT

Pembina Tk. I

NIP, 19640319 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buru Selatan di Namrole (sebagai laporan);
2. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Buru Selatan di Namrole ;
3. Dekan Fak. Ekonomi Universitas Bosowa Makassar di Makassar,
4. Sdr/i. Rosmina Saturu;